

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 11010 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-960/DJAI.3/AI.01.01/08/2023

Jakarta, 7 Agustus 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Bimbingan Teknis SPLP

Kepada Yth.

(daftar terlampir)

di Tempat

Dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI. Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan hal tersebut, kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa – Rabu, 29 – 30 Agustus 2023

Waktu : 09.00 s.d. 17.00 WIB

Lokasi : Hotel Santika Premiere Malang

Jl. Letjen Sutoyo No.79, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65141

Agenda : Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kami berharap Saudara dapat menugaskan pejabat/staff yang membidangi terkait pengolahan data untuk hadir secara luring (dilokasi acara kuota 50 peserta) ataupun secara daring. Registrasi dan konfirmasi kehadiran dilakukan melalui form registrasi pada tautan berikut: https://s.id/splp-nasional. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Diansyah Ermawan (+62 811-1041-240). Adapun biaya perjalanan dinas dan akomodasi lainnya ditanggung oleh masing-masing instansi, panitia hanya menanggung konsumsi selama kegiatan berlangsung.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

Lampiran Surat : Daftar Undangan

Nomor : B-960/DJAI.3/AI.01.01/08/2023

Tanggal: 7 Agustus 2023

Daftar Pejabat/Pegawai Yang Diundang

Narasumber

- Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/ Bappenas
- 2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri
- 3. Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Eksternal Kominfo

- 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi
 Tengah
- 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
- 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
- 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
- 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
- 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
- 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali
- 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
- 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
- 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri
- 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
- 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten
- 17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan

- 18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara
- 19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan
- 20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat
- 21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Probolinggo
- 22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
- 23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser
- 24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
- 25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara
- 26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari
- 27. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
- 28. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi
- 29. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Stataistik Kabupaten Buleleng
- 30. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
- 31. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
- 32. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
- 33. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun
- 34. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan
- 35. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara
- 36. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai
- 37. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
- 38. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, statistik, dan persandian Kabupaten Kota Bekasi
- 39. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, statistik, dan persandian Kabupaten Cianjur
- 40. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
- 41. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
- 42. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung
- 43. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang
- 44. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

- 45. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
- 46. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi
- 47. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maluku Barat Daya
- 48. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
- 49. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

Internal Kominfo

- 1. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
- 2. Shinta Nurhariyanti, Ketua Tim Interoperabilitas, Big Data dan Kecerdasan Buatan, Dit. LAIP
- 3. Nova Zanda, Dit. LAIP
- 4. Ichwanul Muslim, Dit. LAIP
- 5. Evan Fajar Bangun, Dit. LAIP
- 6. Afie Yudha Triadi, Dit. LAIP
- 7. Lita Nurdiani, Dit. LAIP
- 8. Madriko Nurhafzi, Dit. LAIP
- 9. Dhanang Sutawijaya, Dit. LAIP
- 10. Diansyah Ermawan, Dit. LAIP
- 11. Citra Puspasari, Dit LAIP
- 12. Tim Teknis SPLP

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

Bambang Dwi Anggono

Lampiran Surat : Agenda Undangan

Nomor : B-960/DJAI.3/AI.01.01/08/2023

Tanggal : 7 Agustus 2023

AGENDA ACARA		
WAKTU (WIB)	URAIAN	KETERANGAN
Selasa, 29 Agustus 2023		
09.00 - 09.30	Sambutan dan pembukaan	Direktur LAIP
09.30 – 12.00	Sosialisasi dan Diskusi terkait 1. Satu Data Indonesia 2. Pemanfaatan Master Data Kode Wilayah via SPLP 3. Regulasi terkait Interoperabilitas 4. Teknis Pemanfaataan SPLP	 Narasumber 1. Kementerian PPN/Bappenas, Koordinator SDI 2. Kapusdatin Kemendagri 3. Plt Direktur Tata Kelola 4. Direktur LAIP
12.00 – 13.00	Ishoma	
13.00 – 15.00	Materi Membuat API dengan Koneksi Database Materi Query Database Standar CRUD dalam API	Narasumber dan Tim Teknis
15.00 – 15.30	Ishoma	
15.30 – 17.00	Materi Management API sebagai Penyedia Data	Narasumber dan Tim Teknis
Rabu, 30 Agustus 2023		
09.00 – 10.00	Review Kegiatan Bimtek Hari Pertama	Narasumber dan Tim Teknis
10.00 – 11.30	Materi Management API sebagai Pengguna Data Materi Management API sebagai Admin	Narasumber dan Tim Teknis
11.30 – 13.30	Ishoma	
13.30 – 15.00	Sharing Pemanfaatan SPLP untuk Internal Instansi dan Lintas Instansi	Semua Peserta
15.00 – 15.30	Ishoma	
15.30 – 16.30	Evaluasi Pemahaman dan Quiz	Semua Peserta
16.30 – 17.00	Penutupan Kegiatan	Semua Peserta

Lampiran Surat : Term Of Reference (TOR)

Nomor : B-960/DJAI.3/AI.01.01/08/2023

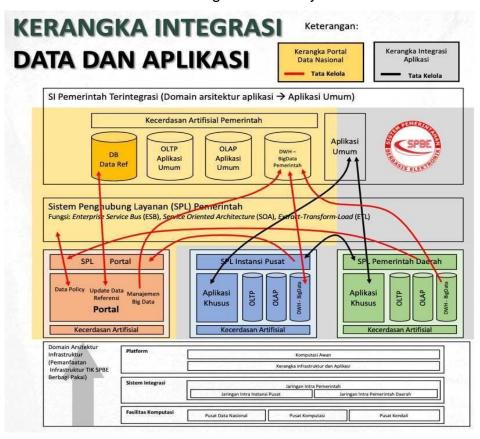
Tanggal: 7 Agustus 2023

TERM OF REFERENCE (TOR)

1. Pendahuluan

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia sebagai pedoman standar interoperabilitas data dan informasi dalam pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan dalam penyelenggaraan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) merupakan Infrastruktur SPBE yang berfungsi sebagai perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.



Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memiliki fungsi Enterpise

Service Bus (ESB), API Management, Katalog, dan Gateway, dan Konsolidasi Data atau *Extract Transform Load* (ETL), SDK Komponen Umum Aplikasi. SPLP yang dikembangkan juga menyediakan fitur *multi-tenant* dan *mutli-account* dalam mendukung Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendukung pemanfaatan Pusat Data Nasional.

SPLP dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI) memiliki tugas untuk menyediakan fasilitas layanan sistem penghubung yang dapat dipergunakan untuk malakukan manajemen API dan interoperabilitas data antar aplikasi. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan koordinasi yang kuat antara stakeholder SPBE dan SDI. Target yang ditentukan di tahun ini adalah pengembangan Sistem Interoperabilitas untuk saling dapat berbagi pakai data lintas Kementerian/Lembaga/Daerah, Konsolidasi Data aplikasi sejenis ke aplikasi umum yang telah ditetapkan, dan penyusunan Dokumen usulan Kamus Data.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan konsep Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Katalog Layanan Interoperabiltas Data (LID) yang dapat membantu implementasi interoperabilitas sistem dan manajemen API dari K/L/D.

3. Output Kegiatan

Laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP),

- Peserta Bimbingan Teknis SPLP dapat mengoperiskan layanan SPLP secara mandiri.
- 2. Peserta Bimbingan Teknis SPLP dapat membuat API, mempublish API dan merequest API secara mandiri.
- 3. SPLP dimanfaatkan dalam mendukung implementasi sistem interoperabilitas di internal IPPD.

4. Syarat

Peserta harap melakukan registrasi awal dan konfirmasi kehadiran melalui tautan https://s.id/splp-nasional. Peserta juga dapat menyiapkan perangkat laptop atau PC untuk mengikuti jalannya kegiatan Bimtek SPLP. Untuk mendapatkan Akun SPLP production atau Akun SPLP permanen silahkan dapat melampirkan surat permohonan yang dapat dikirim ke email (https://s.id/splp-nasional. Format contoh surat permohonan dapat di lihat pada tautan https://s.id/splp-nasional.

Peserta dapat menyiapkan studi kasus integrasi dan interoperabilitas data lintas OPD dalam internal Pemerintah Daerah masing-masing atau dengan Instansi Pusat yang akan dibahas saat kegiatan sharing pemanfaatan SPLP. Beberapa use case yang mungkin dapat dipraktekan adalah:

- a. Mempublish API Open Data (CKAN/DCAT/CSW/dsb) di SPLP
- b. Memanfaatkan Master Data dari Instansi Pusat. (Master Data Wilayah, Kode Referensi Statistik, Master Data Instansi, Data Cuaca dan Gempa)
- c. Membuat Skema Keterhubungan antar Aplikasi Internal dengan menyiapkan bahan sebagai berikut:

Lokasi Server Aplikasi?

Pusat Data Nasional / Pusat Data Lokal Instansi / Cloud Keterhubungan dengan Aplikasi

Keterhubungan Exisiting via (Public/Local Saja/Public via VPN/Private via MPLS)*

- i. Credensial VPN (jika ada)
 - 1. IP?
 - 2. Username?
 - 3. Password?
 - 4. Port?
- ii. Credensial Database
 - 1. IP?
 - 2. Username Database?
 - 3. Password Database?
 - 4. Port Database ?

Struktur Database Sumber

